Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan
Volume 2, Nomor 3, Agustus 2025
e-ISSN: 3046-8140; p-ISSN: 3046-8809, Hal. 367-378
DOI: https://doi.org/10.61132/jeap.v2i3.1390
Available Online at: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JEAP

Analisis Perilaku Kecurangan (Fraud) Tenaga Kerja UMKM terhadap Keberlangsungan Usaha: Study Kasus pada UMKM HJ.GUS BUSANA

Hafizh Dzaky Hawari[1], Rizki Aryanto[2], Abda[3], Rifqi Muzakki[4]
[1-4] Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

Alamat: Jl. Tuanku Tambusai, Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28290
Korespondensi penulis: hafizhhawari6@gmail.com[1*]

Abstract. *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a vital role in supporting national economic growth, particularly through their contributions to job creation and the development of local potential. MSMEs serve as the backbone of inclusive economic development by reaching various segments of society. However, despite their strategic importance, MSMEs often face internal challenges, including the risk of fraud committed by employees. This study aims to examine the forms of fraud risk occurring within the MSME HJ.GUS BUSANA and analyze their impact on business operations. A qualitative descriptive approach was used, with data collected through direct interviews with the business owner. This method allowed for a contextual and in-depth understanding of the types of fraud experienced. The findings reveal two primary forms of employee fraud that pose a threat to operational efficiency and business sustainability. First, the excessive use of raw materials without the owner's knowledge or approval, categorized as a high-risk behavior. Second, the use of business facilities such as equipment and working hours for personal purposes, categorized as a moderate-risk behavior. These practices lead to resource wastage, increased operational costs, and decreased productivity. The impact of such fraud is not only financial but can also erode trust within the workplace environment. Therefore, a more effective internal control system is essential, including proper monitoring of material usage and access to business resources. Additionally, instilling strong work ethics and a sense of responsibility among employees is crucial in building a positive organizational culture. Implementing these measures is key to ensuring that MSMEs can not only survive but also grow sustainably amidst the ever-changing business landscape. Strengthening internal supervision and ethical awareness can significantly reduce the risk of fraud, thereby enhancing the long-term resilience and performance of the enterprise.*

Keywords: *control system, fraud, internal risk, MSMEs, workforce.*

Abstrak. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan potensi ekonomi lokal. UMKM menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif karena mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Namun, di balik peran strategis tersebut, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah risiko kecurangan (fraud) internal yang dilakukan oleh tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bentuk-bentuk risiko fraud yang terjadi pada UMKM HJ.GUS BUSANA dan menganalisis dampaknya terhadap aktivitas operasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan pemilik usaha. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi kontekstual dan mendalam terkait kasus kecurangan yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua bentuk utama tindakan kecurangan yang berisiko menghambat efisiensi dan keberlangsungan usaha. Pertama, penggunaan bahan baku secara berlebihan tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemilik usaha, yang dikategorikan sebagai risiko tinggi. Kedua, penggunaan fasilitas usaha seperti peralatan dan waktu kerja untuk kepentingan pribadi oleh tenaga kerja, yang dikategorikan sebagai risiko sedang. Kedua bentuk fraud ini berpotensi menimbulkan pemborosan sumber daya, meningkatkan biaya operasional, serta menurunkan produktivitas. Dampak dari fraud ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga dapat merusak kepercayaan dalam lingkungan kerja. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengawasan internal yang lebih ketat, termasuk pencatatan penggunaan bahan dan pengendalian akses terhadap fasilitas usaha. Selain itu, penting untuk menanamkan nilai-nilai etika kerja dan tanggung jawab kepada seluruh karyawan sebagai bagian dari budaya organisasi. Langkah-langkah ini penting agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu tumbuh secara berkelanjutan dalam menghadapi dinamika bisnis yang terus berubah.

Kata kunci: fraud, risiko internal, sistem pengendalian, tenaga kerja, UMKM.

Received: Juli 01, 2025; Revised: Juli 15, 2025; Accepted: Juli 29, 2025; Online Available: Juli 31, 2025

1. LATAR BELAKANG

Menurut (Absari et al., 2023) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam memperkuat aktivitas bisnis dan perekonomian nasional. Keberadaan UMKM turut mendorong pertumbuhan sektor usaha serta membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat, sehingga membantu menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Di Indonesia, laju pertumbuhan ekonomi turut didorong oleh kontribusi signifikan dari sektor UMKM, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja. UMKM juga kerap menjadi penggerak dalam menciptakan ide-ide baru yang segar serta solusi kreatif bagi kebutuhan pasar, menjadikannya pusat inovasi yang terus berkembang di tengah dinamika ekonomi. Lebih dari itu, UMKM terbukti memiliki ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, termasuk saat terjadi krisis. Banyak pelaku usaha kecil tetap mampu bertahan dan bahkan berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Hal ini menjadikan UMKM sebagai sektor strategis yang terus diperkuat oleh berbagai pihak di Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang mampu memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan masyarakat secara luas. UMKM tidak hanya berperan sebagai penggerak roda ekonomi di tingkat lokal, tetapi juga menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat perekonomian nasional. Di Indonesia, keberadaan UMKM sangat mudah ditemui karena telah berkembang secara masif dan menjamur di hampir setiap sudut daerah, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM menjadi pilihan utama masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan (Yustitia & Adriansah, 2022).

Perkembangan UMKM yang pesat ini tidak terjadi tanpa alasan. Keunggulannya dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, memberikan peluang usaha bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta kemampuannya untuk bertahan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil menjadikan UMKM sebagai sektor yang sangat vital (Putri & Nugroho, 2021). Selain itu, UMKM juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mereka, menciptakan produk-produk lokal yang memiliki daya saing dan nilai jual tinggi, serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya berdampak positif terhadap pembangunan nasional (Widiyanto & Lestari, 2020).

Semakin cepatnya perkembangan industri fashion pada saat ini, dikarenakan banyak orang yang mencari butik untuk membeli baju ataupun membuat baju, juga membuat industri fashion tumbuh menjadi banyak (Sari & Hidayat, 2020). Di sini, HJ. GUS BUSANA merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang fashion, yang berdiri sejak tahun 1998. Usaha ini didirikan oleh Ibu Gusniar dan dikelola oleh pendiri sekaligus pemilik usaha tersebut.

Saat ini UMKM tersebut berada di Jalan Pelajar, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, Riau. Dari banyaknya UMKM di Indonesia tidak luput dari yang namanya kecurangan (fraud).

Fraud merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk menyembunyikan fakta atau memanipulasi informasi guna mendapatkan keuntungan pribadi atau menghindari tanggung jawab hukum (Suhardi, 2019). Tindakan ini sering kali menyebabkan kerugian baik bagi individu maupun suatu organisasi. Meskipun fraud memiliki kemiripan dengan korupsi, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Fraud berkaitan dengan upaya menipu pihak lain secara sengaja demi memperoleh manfaat yang tidak sah, sedangkan korupsi lebih merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang diberikan untuk kepentingan pribadi (Wicaksono & Ramadhani, 2022).

Secara hukum, fraud termasuk dalam kategori pelanggaran pidana maupun perdata karena melibatkan unsur kebohongan dan niat jahat. Oleh sebab itu, pelaku fraud dapat dikenai tuntutan hukum (Amalia, 2021). Tindakan ini mencerminkan ketidakjujuran dan manipulasi dalam berbagai bentuk, seperti pemalsuan dokumen, penggelapan dana, atau penyajian informasi yang tidak sesuai kenyataan demi mengelabui pihak lain (Hutabarat & Prasetyo, 2023). Karena itu, penting bagi pelaku UMKM untuk memiliki sistem pengendalian internal yang kuat guna mencegah dan mendeteksi fraud sejak dini (Rizkiana & Fathoni, 2022).

(Yustitia & Adriansah, 2022) Banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengelola strategi bisnis serta manajemen risiko secara efektif. Kurangnya pemahaman dan kemampuan dalam menyusun perencanaan usaha sering kali menjadi hambatan dalam menghadapi tantangan yang muncul. Padahal, dalam dunia usaha, keberadaan risiko merupakan sesuatu yang tak terhindarkan dan pasti akan dihadapi oleh setiap jenis usaha, termasuk skala kecil dan menengah. Kemampuan untuk mengenali potensi risiko sejak awal memiliki peran penting dalam membantu pelaku usaha memperkirakan dampak yang mungkin timbul. Dengan mengenali risiko lebih dini, pelaku UMKM dapat menyiapkan langkah-langkah antisipatif yang tepat agar tidak terjadi kerugian besar. Di sinilah pentingnya penerapan manajemen risiko, yakni sebuah proses sistematis untuk mengendalikan, menilai, dan mengurangi berbagai potensi gangguan terhadap kelangsungan usaha.

Hal ini sejalan juga di mana situasi serupa yang dialami oleh UMKM HJ.GUS BUSANA, di mana dalam kegiatan operasional sehari-harinya, usaha ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk potensi kecurangan yang berasal dari tenaga kerja. Keberadaan risiko tersebut dapat menghambat kelancaran usaha dan menimbulkan dampak negatif terhadap keuangan maupun kepercayaan dalam lingkungan kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi risiko kecurangan yang dilakukan oleh tenaga kerja di UMKM HJ.GUS BUSANA serta menelaah dampak yang ditimbulkan terhadap keberlangsungan operasional usaha. Selain itu, penelitian ini juga berupaya merumuskan solusi yang tepat untuk mencegah dan menangani tindakan kecurangan internal. Mengingat UMKM ini tengah bersiap melakukan pengembangan usaha, maka penting untuk membangun sistem pengawasan yang efektif demi menjaga stabilitas, daya saing, serta meminimalkan risiko kerugian akibat perilaku tidak jujur dari pihak internal.

2. KAJIAN TEORITIS

UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bentuk usaha skala kecil yang memiliki kontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan serta peningkatan ekonomi masyarakat. Peran UMKM sangat signifikan karena mampu menjadi tulang punggung perekonomian di berbagai daerah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, mendukung pendapatan rumah tangga, serta mendorong aktivitas ekonomi lokal. Salah satu keunggulan utama dari UMKM adalah daya tahannya yang tinggi dalam menghadapi berbagai kondisi ekonomi, termasuk ketika terjadi ketidakstabilan nasional maupun global (Al Farisi et al., 2022).

(Hapsari et al., 2024) juga menjelaskan bahwa usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah bentuk kegiatan usaha yang dijalankan oleh individu, kelompok masyarakat, rumah tangga, atau entitas usaha kecil lainnya yang berfokus pada aktivitas ekonomi berskala kecil hingga menengah. UMKM mencakup berbagai sektor, mulai dari perdagangan, jasa, hingga industri rumahan yang memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian lokal maupun nasional. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan UMKM di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, baik dari segi jumlah pelaku usahanya maupun dari sisi kualitas produk dan layanan yang dihasilkan. Peningkatan ini mencerminkan semangat kewirausahaan masyarakat yang terus tumbuh serta kebutuhan pasar yang semakin dinamis.

UMKM juga menjadi wadah bagi banyak masyarakat untuk memulai usaha mandiri dan menciptakan peluang kerja baru di berbagai wilayah. Melihat peran strategis UMKM dalam pembangunan ekonomi, pemerintah turut memberikan perhatian khusus melalui berbagai kebijakan dan program dukungan. Salah satunya adalah penyediaan pelatihan, pembinaan, serta pengembangan keterampilan bagi para pelaku usaha. Berbagai bentuk fasilitasi ini ditujukan agar UMKM dapat meningkatkan daya saing, memperluas pasar, serta mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi di era modern yang serba cepat.

Fraud

Menurut (Noviani et al., 2022) kecurangan (fraud) merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok, sering kali dengan cara yang melanggar etika dan hukum. Fraud dapat diartikan sebagai serangkaian ketidakwajaran dan tindakan ilegal yang disengaja, dilakukan oleh orang dalam maupun luar organisasi, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan tertentu dan/atau merugikan pihak lain termasuk organisasi itu sendiri. Tindakan fraud ini secara umum diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu:

- Kecurangan laporan keuangan, yaitu tindakan manipulasi atau penyajian informasi yang tidak benar dalam laporan keuangan oleh pihak manajemen. Tujuannya untuk menyesatkan para stakeholder seperti investor, kreditor, atau otoritas pajak.
- Penyalahgunaan aset, yakni bentuk kecurangan yang berkaitan dengan pencurian atau penyalahgunaan aset perusahaan, baik berupa kas maupun non-kas.
- Korupsi, yang mencakup praktik seperti konflik kepentingan (conflict of interest), suap (bribery), gratifikasi ilegal (illegal gratuity), serta pemerasan ekonomi (economic extortion).

Perlu disadari bahwa praktik fraud tidak hanya berdampak pada kerugian finansial semata, namun juga merusak reputasi organisasi, menurunkan kepercayaan publik, serta dapat menimbulkan efek hukum bagi individu atau institusi yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi untuk memiliki sistem pengendalian internal dan budaya etika yang kuat sebagai bentuk pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi kecurangan.

Risiko Fraud

Risiko dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai kemungkinan terjadinya kesalahan atau penurunan mutu yang timbul akibat berjalannya suatu proses atau kegiatan. Penilaian risiko merupakan proses pengelompokan atau pengukuran tingkat risiko secara kuantitatif agar lebih mudah dikendalikan dan ditangani sesuai dengan prinsip efisiensi biaya dan manfaat (Cost and Benefit). Risk assessment menjadi elemen penting yang perlu diperhatikan baik oleh pihak manajemen maupun auditor dalam proses pengambilan keputusan. Setiap usaha mengandung unsur risiko murni, yaitu risiko yang timbul bukan karena spekulasi, melainkan sebagai konsekuensi alami dari jalannya suatu usaha. Ia juga menekankan bahwa dua bentuk risiko yang termasuk dalam kategori ini dapat berdampak serius terhadap kelangsungan bisnis, sehingga diperlukan perhatian dan

pengelolaan yang ekstra hati-hati untuk meminimalkan potensi kerugiannya. Sementara itu, dalam istilah umum, fraud diartikan sebagai bentuk ketidakjujuran. Dalam konteks sehari-hari, fraud merujuk pada perilaku menyimpang yang memiliki implikasi hukum, seperti penggelapan, pencurian dengan modus penipuan, kecurangan laporan keuangan, korupsi, kolusi, nepotisme, suap, serta penyalahgunaan kekuasaan (Widilestariningtyas, 2017).
terdapat empat faktor utama yang mendorong seseorang melakukan tindakan fraud, dikenal dengan teori GONE, yaitu:

- Greed (keserakahan) – dorongan untuk memperoleh keuntungan berlebih secara tidak sah.
- Opportunity (kesempatan) – adanya celah atau kelemahan dalam sistem pengawasan yang memungkinkan fraud terjadi.
- Need (kebutuhan) – tekanan ekonomi atau kebutuhan pribadi yang mendesak.
- Exposure (pengungkapan) – kemungkinan terbongkarnya tindakan tersebut dan seberapa besar konsekuensinya.

Dengan memahami faktor-faktor pemicu dan proses penilaian risiko secara mendalam, organisasi dapat merancang strategi pengendalian internal yang lebih efektif untuk meminimalkan terjadinya kecurangan dan kerugian operasional. Pencegahan fraud bukan hanya soal pengawasan, melainkan juga tentang membangun budaya integritas dalam setiap lini organisasi.

Tenaga Kerja

(Wildan & Mufarrohah, 2021) menjelaskan bahwa Tenaga kerja merupakan elemen krusial dalam menjalankan suatu usaha. Meskipun perkembangan teknologi terus meningkat, peran manusia tetap menjadi faktor penentu dalam keberhasilan bisnis. Di sisi lain, pelaku UMKM kerap menghadapi hambatan dalam memperoleh tenaga kerja yang terampil dan berkualitas untuk mendukung proses produksi. Keberadaan tenaga kerja turut memengaruhi besarnya nilai produksi, karena tenaga kerja termasuk salah satu faktor produksi yang memiliki peran vital dalam operasional usaha. Tujuan utama penggunaan tenaga kerja adalah untuk mengelola serta mengolah bahan baku dalam kegiatan usaha. Oleh karena itu, tenaga kerja memiliki dampak besar terhadap nilai produksi, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap performa bisnis secara keseluruhan.

Tenaga kerja memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung pembangunan ekonomi, karena berfungsi sebagai faktor produksi yang aktif dalam mengelola serta mengatur

faktor-faktor produksi lainnya. Tenaga kerja merujuk pada setiap individu yang memiliki kemampuan untuk bekerja guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan masyarakat. Dalam proses produksi, tenaga kerja menjadi elemen penting yang harus diperhitungkan. Ketersediaan tenaga kerja tidak hanya diukur dari jumlahnya, tetapi juga dari segi kualitas dan jenis keterampilannya. Dalam kajian ekonomi, tenaga kerja dipahami sebagai kekuatan fisik dan intelektual manusia yang melekat pada dirinya dan digunakan dalam kegiatan produksi. Secara umum, tenaga kerja juga dapat diartikan sebagai unsur yang bertugas mengelola sumber daya alam melalui tenaga manusia, yang dikenal pula sebagai sumber daya manusia (Wulandari Kumala Hida, 2022).

Analisis Level Risiko

Tabel 1. Matriks Risiko

Matriks Risiko		**Keparahan**				
		Sangat Ringan	**Ringan**	**Sedang**	**Berat**	**Sangat Berat**
Frekuensi	**Sangat Sering**	Sedang	Tinggi	Tinggi	Ekstrim	Ekstrim
	Sering	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Ekstrim
	Jarang	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi	Ekstrim
	Sangat Jarang	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
	Hampir Tidak Pernah	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi

Tabel 2. Rekomendasi Tindakan

Kategori	**Rekomendasi**
Rendah	Diperlukan prosedur baru dalam proses produksi
Sedang	Diperlukan tindakan langsung
Tinggi	Diperlukan perencanaan pengendalian risiko
Ekstrim	Diperlukan perhatian dan tindakan pemangku kepentingan

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh oleh peneliti ini dengan cara kualitatif yaitu dengan data primer. Data primer disini merupakan data yang dihasilkan dengan cara wawancara atau interview dengan pelaku mitra UMKM secara langsung untuk memberikan keterangan tentang permasalahan yang menggambarkan suatu gejala atau kondisi UMKM.

Jenis Pengumpulan Data

Masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami bagaimana menyusun laporan keuangan yang baik sesuai menurut SAK EMKM. Biasanya mereka hanya melakukan pembukuan sederhana saja, akan tetapi pembukuan tersebut belum sesuai dengan SAK EMKM. Oleh karena itu diperlukan adanya penelitian kepada pelaku UMKM agar dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Pemecahan masalah yang direncanakan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Obsevasi

  Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan langsung terjun ke lapangan
- Wawancara

  Wawancara yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab langsung dengan narasumber yang berkaitan erat sebagi informasi penelitian ini.
- Dokumentasi

  Dimana mencatat berbagai informasi yang mendukung penelitian, baik tempat lokasi penelitian maupun narasumber.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Risiko

HJ.GUS BUSANA merupakan salah satu pelaku usaha di sektor fashion yang telah berdiri sejak tahun 1998. UMKM ini berlokasi di Jalan Pelajar, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dalam menjalankan aktivitas usahanya, HJ.GUS BUSANA tidak lepas dari berbagai bentuk risiko yang dapat menghambat operasional. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha, diketahui bahwa terdapat sejumlah risiko yang dihadapi, khususnya yang berkaitan dengan praktik kecurangan. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan mengacu pada matriks penilaian risiko, yaitu dengan menilai seberapa sering risiko tersebut bisa terjadi (frekuensi) dan seberapa besar dampaknya jika benar-benar terjadi.

Tingkat kemungkinan terjadi dibagi menjadi sangat sering, sering, jarang,sangat jarang, dan tidak pernah. Sedangkan dampaknya dibagi menjadi sangat ringan, ringan, sedang, berat, dan sangat berat.

Tabel 3. Identifikasi Risiko

No	Jenis Risiko	Klasifikasi Risiko	Kode	Frekuensi	Konsekuensi
1	Risiko Kecurangan	Penggunaan Bahan baku secara berlebihan tanpa izin	A1	Sering	Berat
		Penggunaan fasilitas usaha untuk keperluan pribadi	B1	Sangat jarang	Sedang

Penilaian Risiko

Berdasarkan hasil klasifikasi yang tercantum dalam tabel sebelumnya, dapat diketahui bahwa HJ.GUS BUSANA dihadapkan pada berbagai jenis risiko, terutama yang berkaitan dengan potensi kecurangan. Risiko-risiko tersebut memiliki kemungkinan untuk memberikan dampak signifikan terhadap laju pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Setelah dilakukan identifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan analisis dan penilaian risiko menggunakan pendekatan *Likelihood-Impact Matrix*. Penggunaan matriks ini bertujuan untuk membantu dalam mengevaluasi tingkat risiko berdasarkan dua aspek utama, yaitu frekuensi terjadinya (kemungkinan) dan tingkat keparahan dampaknya. Matriks ini terbagi dalam lima kategori warna yang merepresentasikan level risiko, yakni hijau untuk risiko rendah, kuning untuk risiko sedang, merah untuk risiko tinggi, dan abu-abu untuk risiko dengan tingkat keparahan yang sangat ekstrem.

Tabel 4. Likelihood-Impact Matrix

Matriks Risiko		**Keparahan**				
		Sangat Ringan	**Ringan**	**Sedang**	**Berat**	**Sangat Berat**
Frekuensi	**Sangat Sering**					
	Sering				A1	
	Jarang					
	Sangat Jarang			B1		
	Hampir Tidak Pernah					

Berdasarkan hasil observasi di lapangan serta wawancara langsung dengan pemilik UMKM HJ.GUS BUSANA, ditemukan dua bentuk risiko kecurangan yang memiliki tingkat urgensi berbeda. Risiko pertama adalah A1, yaitu penggunaan bahan baku secara berlebihan tanpa seizin pemilik oleh tenaga kerja. Risiko ini dikategorikan memiliki tingkat frekuensi sering dengan dampak yang bersifat berat. Hal ini disebabkan oleh ketidakpatuhan karyawan terhadap standar takaran bahan baku yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan pemborosan material, meningkatnya biaya produksi, dan menurunnya efisiensi proses operasional. Jika praktik ini tidak dikendalikan melalui sistem pengawasan yang ketat, maka dalam jangka panjang dapat mengganggu struktur biaya usaha, menurunkan laba, dan bahkan membahayakan kelangsungan operasional UMKM HJ.GUS BUSANA yang memiliki keterbatasan modal dan sumber daya produksi.

Di sisi lain, risiko **B1** merujuk pada tindakan penggunaan fasilitas usaha untuk keperluan pribadi oleh tenaga kerja. Risiko ini tergolong memiliki **frekuensi sangat jarang** terjadi, namun tetap memberikan **dampak yang bersifat sedang** terhadap operasional usaha. Meski kejadiannya tidak sering ditemukan, pemanfaatan aset seperti mesin jahit, listrik, maupun perlengkapan produksi lainnya untuk kebutuhan di luar kepentingan usaha tanpa seizin pemilik dapat menimbulkan pemborosan sumber daya, berisiko merusak peralatan, serta melanggar prinsip etika kerja. Kejadian seperti ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal yang dapat membuka ruang bagi perilaku permisif di kalangan karyawan apabila tidak segera ditindaklanjuti. Oleh sebab itu, baik risiko **A1** maupun **B1** harus mendapat penanganan yang serius dalam sistem manajemen risiko internal agar keberlanjutan kegiatan operasional UMKM HJ.GUS BUSANA dapat tetap terjaga secara konsisten dan berkelanjutan.

Pengendalian Risiko

Upaya pengendalian terhadap risiko penggunaan bahan baku secara berlebihan tanpa persetujuan menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian serius dari UMKM HJ.GUS BUSANA. Risiko ini dapat menyebabkan inefisiensi dalam pemanfaatan bahan, meningkatkan beban biaya produksi, serta menurunkan tingkat keuntungan usaha. Selain itu, ketidaksesuaian antara jumlah bahan yang digunakan dengan volume hasil produksi juga berpotensi menyulitkan proses evaluasi dan pencatatan kinerja operasional. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengendalian yang jelas, khususnya dalam bentuk regulasi penggunaan bahan baku yang harus ditaati oleh seluruh tenaga kerja. Penerapan prosedur standar kerja yang disosialisasikan secara menyeluruh akan membantu menciptakan pemahaman bersama mengenai batas penggunaan bahan sesuai kebutuhan produksi. Disamping itu, pemantauan

harian terhadap stok bahan dan catatan pemakaian secara terstruktur perlu dilakukan secara berkala untuk mendeteksi sedini mungkin adanya penyimpangan dalam proses produksi**.** Beberapa langkah pengendalian yang dapat dilakukan antara lain:

- Menyusun standar penggunaan bahan baku untuk setiap model produk secara tertulis dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan
- Melakukan pencatatan harian terkait penggunaan bahan baku oleh setiap lini produksi di HJ.GUS BUSANA
- Mengadakan pelatihan rutin mengenai efisiensi bahan dan dampaknya terhadap kelangsungan usaha.
- Memberikan sanksi atau peringatan bagi tenaga kerja HJ.GUS BUSANA yang terbukti menyalahgunakan bahan melebihi batas wajar tanpa alasan teknis.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya perhatian terhadap risiko kecurangan internal yang dilakukan oleh tenaga kerja dalam lingkungan UMKM, khususnya pada HJ.GUS BUSANA. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan dua bentuk utama kecurangan, yaitu penggunaan bahan baku secara berlebihan tanpa persetujuan, serta pemanfaatan fasilitas usaha untuk kepentingan pribadi. Meskipun frekuensi terjadinya berbeda, keduanya memiliki dampak yang dapat mengganggu efisiensi operasional, meningkatkan biaya produksi, dan menurunkan profitabilitas usaha. Oleh sebab itu, penerapan sistem pengendalian yang terstruktur, seperti prosedur penggunaan bahan baku, pencatatan pemakaian harian, dan pelatihan berkala, menjadi langkah penting untuk meminimalkan potensi kerugian. Selain itu, peningkatan kesadaran akan etika kerja dan penerapan sanksi yang tegas juga perlu dilakukan guna menjaga integritas tenaga kerja. Upaya-upaya ini sangat krusial dalam memastikan kelangsungan dan daya saing UMKM di tengah dinamika bisnis yang terus berkembang.

DAFTAR REFERENSI

Absari, S. A., Mawardi, M. C., & Fakhriyyah, D. D. (2023). Analisis penerapan pengendalian internal dalam mendeteksi serta mencegah kemungkinan adanya tindakan fraud pada UMKM. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 12*(02), 1285–1297.

Al Farisi, S., Iqbal Fasa, M., & Suharto. (2022). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, 9*(1), 73–84. https://doi.org/10.53429/jdes.v9ino.1.307

Amalia, R. (2021). Pencegahan tindakan fraud di sektor UMKM. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 6*(2), 89–97. https://doi.org/10.24815/jhpe.v6i2.21012

Hapsari, Y. A., Apriyanti, P., Hermiyanto, A., & Rozi, F. (2024). Analisa peran UMKM terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. *[Nama jurnal tidak disebutkan], 4*, [halaman tidak tersedia].

Hutabarat, F., & Prasetyo, M. (2023). Perilaku kecurangan dalam operasi bisnis: Studi kasus UMKM di Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 14*(1), 112–125.

Noviani, N., Nurmala, P., & Adiwibowo, A. S. (2022). Pengaruh gaya kepemimpinan, moralitas individu, dan audit internal terhadap risiko fraud. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 19*(2), 68. https://doi.org/10.30595/kompartemen.v19i2.9149

Putri, A. M., & Nugroho, D. (2021). Peran UMKM dalam penyerapan tenaga kerja dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, 5*(1), 33–40.

Rizkiana, R., & Fathoni, A. (2022). Implementasi pengendalian internal dalam pencegahan fraud pada UMKM. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis, 10*(2), 147–155.

Sari, D. A., & Hidayat, M. (2020). Tren industri fashion di era digital: Peluang UMKM Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Kreativitas, 7*(3), 56–62.

Sihotang, J. S., Achima, S., Hutagaol, E., Manfadzi, R., & Info, A. (2024). Analisis manajemen risiko terhadap keberlangsungan usaha UMKM: Studi kasus pada Evan Bakery. *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 374–384.

Suhardi. (2019). *Manajemen risiko fraud*. [Penerbit tidak disebutkan].

Suhardi, S. (2019). *Etika bisnis dan pencegahan fraud pada UMKM*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Widilestariningtyas, O. (2017). Pengaruh audit internal terhadap risiko fraud (Survey pada PT. BRI di wilayah Bandung). *Jurnal Riset Akuntansi, 6*(1). https://doi.org/10.34010/jra.v6i1.515

Wicaksono, R., & Ramadhani, F. (2022). Perbedaan fraud dan korupsi: Perspektif hukum dan etika. *Jurnal Integritas dan Akuntabilitas Publik, 9*(1), 77–88.

Widiyanto, A., & Lestari, T. (2020). UMKM sebagai pilar ekonomi nasional di era globalisasi. *Jurnal Ekonomi Rakyat, 3*(2), 45–52.

Wildan, M. A., & Mufarrohah. (2021). Inovasi memantau perilaku fraud tenaga kerja UMKM di Kota Surabaya (Studi kasus Sabana Fried Chicken Surabaya). *Eco-Entrepreneurship, 7*(2), 111–126.

Wulandari, K. H. (2022). Pengaruh modal kerja, tenaga kerja, dan bahan baku terhadap [judul tidak lengkap]. *Jurnal Penelitian Pengabdian Masyarakat Indonesia, 1*(1), 68–78.

Yustitia, D., & Adriansah, D. (2022). Kontribusi UMKM terhadap ekonomi nasional Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 11*(2), 98–105.

Yustitia, E., & Adriansah, A. (2022). Pendampingan penentuan harga pokok produksi (HPP) dan harga jual pada UMKM di Desa Sawahkulon. *Jumat Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3*(1), 1–9. https://doi.org/10.32764/abdimas_ekon.v3i1.2506